



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Mendesak Kebutuhan Rumah Aman Anak Korban Kekerasan

Realisasikan Pembangunan SMP Negeri di Jogja Selatan

Ada sejumlah agenda prioritas Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang mendesak direalisasikan.

Di antaranya, kebutuhan rumah aman bagi anak korban kekerasan. Kemudian perlunya pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Jogja bagian selatan.

SOAL kedua itu pernah disinggung dalam kesimpulan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2021. Dalam catatan pansus ada masalah yang masih muncul sejak adanya kebijakan zonasi.

Yakni kesenjangan pendidikan. Kurangnya pelayanan pendidikan di wilayah Kota Jogja bagian selatan. "Banyak SMP negeri berada di wilayah utara dan tengah. Sedangkan di bagian selatan hanya ada dua sekolah," ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani SE Msi kemarin (27/5).

Dua sekolah itu adalah SMP Negeri 9 Jalan Ngeksigondo 30 Prenggan, Kotagede dan SMP Negeri 10 Jalan Trituranggal 2 Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. Sedangkan 12 SMP negeri lainnya terpusat di bagian tengah dan utara Kota Jogja.

"Usulan kami dengan memindahkan salah satu sekolah antara SMP Negeri 12 atau SMP Negeri 14 yang lokasinya berdampingan di daerah Jalan Tentara Pelajar ke Jogja bagian selatan," ujar ibu dua putra ini.

Dikatakan, rekomendasi pansus itu bakal segera ditindaklanjuti. Komisi D dalam waktu dekat menggelar rapat kerja dengan



KAUKUS PEREMPUAN PARLEMEN: Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Suryani (kanan) bersama sejawatnya anggota dewan kota dalam sebuah kunjungan kerja ke Jawa Barat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Agendanya bersamaan saat membahas penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023.

"Nanti kami tanyakan kesiapan dinas," kata Istri Imam Priyono, wakil wali kota Yogyakarta periode 2011-2016 ini.

Diakui, sebenarnya zonasi terkait dengan jarak rumah tinggal siswa dengan sekolah tidak lagi menjadi masalah. Sebab, sudah ada beberapa penyesuaian regulasi. Namun demikian, dewan tetap ingin merealisasikan penyebaran sekolah secara merata.

Kebijakan pemerataan pendidikan tidak hanya untuk solusi jangka pendek. Misalnya dengan menambah rombongan belajar

(rombel). Saat ini SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 masing-masing sudah siap menambah dua ruang kelas. Lahan di kedua sekolah tersebut masih cukup. Meski begitu realisasi penambahan rombel belum bisa direalisasikan tahun ini. "Baru bisa dilaksanakan 2023 mendatang," katanya.

Selain jangka pendek, pemindahan SMP Negeri 12 atau SMP Negeri 14 masuk opsi jangka panjang. Tidak mungkin diwujudkan dalam waktu dekat. Alasannya menyangkut kesiapan lahan. Ada dua SD negeri di Jogja selatan yang digabung.

Lokasi tersebut menjadi alternatif yang akan digunakan. "Keluasan tanah menjadi pertimbangan kami. Sebab, kebutuhan lahan

SMP dan SD tentu berbeda," lanjut alumnus STIE YKPN dan S-2 Akuntansi UGM ini.

Di bagian lain, Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat ini juga menyoroti berbagai fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini. Di antaranya seperti kasus *klitih*. Pelakunya masih tergolong anak. Berusia di bawah 18 tahun. "Kasus *klitih* ini karena anak-anak memiliki energi yang berlebih yang membutuhkan penyaluran," ulas wakil rakyat yang berlatar belakang dosen ini.

Penyaluran energi yang berlebih yang sekarang harus dipikirkan. Sebagai pimpinan komisi, dia melihat perlunya di Kota Jogja dibangun semacam *Youth Center* (YC).

Keberadaan YC ini menjadi tempat bagi para remaja melakukan berbagai macam kegiatan. Mulai dengan seni, olahraga, pendidikan dan rekreasi. YC juga bisa menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi para remaja.

Masalah lainnya yang menjadi perhatian Yani, sapaan akrabnya, mendeskripsikan kebutuhan rumah aman bagi anak korban kekerasan. Selama pandemi, anak-anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Jogja cenderung tinggi. Karena itu, dia menilai rumah aman harus segera dapat diwujudkan. "Ini agar korban kekerasan merasa aman dan terlindungi," katanya. Sejak beberapa waktu lalu Pemkot Yogyakarta telah membentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Yani mengapresiasi keberadaan UPT tersebut. Meski begitu sampai sekarang Kota Jogja belum memiliki rumah aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Sebelumnya, ketika ada perempuan dan anak korban kekerasan dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan "Reksa Dyah Utami" milik Pemda DIY. Dalam perkembangannya perempuan dan anak korban yang ditangani Pemda DIY angkanya juga meningkat. Pemkot Jogja kemudian memutuskan menggunakan fasilitas hotel sebagai rumah aman.

Menyikapi itu, anggota dewan dua periode ini menilai keberadaan rumah aman bakal lebih efektif. Ini dengan catatan dilengkapi dengan ruang konsultasi, konselor hingga penasihat hukum. Lokasi rumah aman harus benar-benar terjaga. "Tidak boleh diketahui publik demi menjaga psikologi korban," ingat dia. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005